

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, penulis sampai pada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam banyak hal Indonesia (Orde Baru) adalah negara korporatis, dimana representasi dari kepentingan-keentingan masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga secara rasional disesuaikan dengan hirarkhis kekuasaan negara. Pemuda sebagaimana halnya kelompok lainnya di dalam masyarakat seperti kelompok pekerja, petani, nelayan, pengusaha dan guru diorganisasikan dalam erangka korporatime-negara. Akan tetapi merupakan suatu hal yang unik dari KNPI yang berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti SPSI, HKTI, HSNI, KADIN, PGRI, KNPI lebih bersifat konfederatif, karena KNPI bukan merupakan satu-satunya kelompok atau organisasi pemuda sehingga KNPI bukan merupakan satu-satunya representasi kepentingan pemuda di Indonesia. Dengan demikian sebenarnya konsep korporatisme negara tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk organisasi kepemudaan di Indonesia. Mengapa demikian ? Karena organisasi-organisasi kepemudaan yang berhimpun dalam KNPI pada umumnya bersifat independen

yang memiliki warna dan tujuan masing-masing. Dan yang lebih substantif yang berkenaan dengan hakekat dunia kepemudaan adalah bahwa dunia kepemudaan secara substantif berbeda dengan segmen lain dari masyarakat. Organisasi pemuda secara historis sudah sangat bervariasi sesuai dengan aliran sosial dalam masyarakat, seperti misalnya Islam, Kristen, Katolik, Sosialis, Nasionalis dan lain-lainnya. Dengan latar belakang historis seperti itu maka sulit sekali bagi negara untuk mengatur pemuda secara korporatis sebab akan mendapatkan reaksi kuat dari kalangan pemuda.

2. Secara teoritis KNPI sebagai kelompok kepentingan telah melaksanakan peranannya dalam pembangunan politik, namun secara praktis, KNPI sebagai organisasi kemasyarakatan dapat dikatakan tidak berperan karena perannya hanya sebatas pada partisipasi politik yang sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah, sehingga kurang menampakkan fungsi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik sebagaimana tuntutan dari fungsi kelompok kepentingan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada DPD KNPI Deli Serdang agar lebih banyak menggelar kegiatan-kegiatan seperti seminar kepemudaan maupun diskusi publik yang terbuka untuk

umum, bukan hanya untuk anggota KNPI atau pemuda yang bergabung dalam organisasi kepemudaan melainkan untuk seluruh pemuda di Deli Serdang, KNPI Deli Serdang juga harus lebih aktif lagi dalam dalam mengayomi para pemuda di Deli Serdang bukan hanya pada saat adanya penggelaran politik tetapi menjadikan kegiatan sebagai rutinitas.

2. DPD KNPI Deli Serdang harus lebih mampu dalam menjaga hubungan baik kepada pihak KPU maupun Pemko Deli Serdang agar kedua pihak tersebut bisa lebih mengandalkan KNPI Deli Serdang dalam menangani urusan kepemudaan di Deli Serdang, selain itu pimpinan KNPI Deli Serdang juga harus tetap menjaga keharmonisan dalam internal KNPI itu sendiri, KNPI Deli Serdang harus lebih mampu dalam meyakinkan masyarakat khususnya pemuda bahwa kegiatan yang dilakukan KNPI Deli Serdang untuk masyarakat dan pemuda bukan dikarenakan adanya politik kepentingan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN